

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

Pada tahun 1982 merupakan langkah awal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk kantor wilayah. Terbentuknya kantor wilayah diatur dengan keputusan Menteri Kehakiman diperbarui dengan nomor M-03.PR-07 Tahun 1992.

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terletak di Jl. Letjen Mt. Haryono No.24, RT.4/RW.1, Cawang, Kecamatan. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana terdapat UPT sejumlah 27 (dua puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 4 (empat) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 4 (empat) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 5 (lima) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), 7 (tujuh) Kantor Imigrasi (KANIM) dan 1 (satu) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan 1 (satu) Rumah Sakit.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyempurnakan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah dengan dibuatnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi tata kerja dan organisasi Kantor Wilayah, dimana Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menjadi instansi pemerintah yang berbentuk vertikal, yang berkedudukan provinsi dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pada struktur organisasi Kantor Wilayah dibentuk 4 divisi utama. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada provinsi akan menentukan tugas dan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah.

2.1 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 2.1 Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumber : <https://itjen.kemenumham.go.id>



Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki makna mengenai kesejahteraan negara dapat terjadi jika pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia harus bisa berjalan dan dipertahankan, Selain itu tulisan “Pengayoman” mengartikan Kemenkumham akan selalu mengayomi serta melindungi seluruh rakyat negara Indonesia, dalam maknanya terdapat pesan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dapat terjadi bila ada Hukum yang pasti seperti filosofis logo yang bersandar kepada “*The Greatest Happiness for the Greatest Number*” suatu negara harus mampu membangun dan menjaga pilar utama yaitu ketertiban, keamanan, kebenaran, dan keadilan..

2.3.1 Landasan Filosofi dan makna :

- Lima bentuk setengah lingkaran menggambarkan pancasila.
- Kehidupan dan Kebijaksanaan nilai transenden yang membumi. (Pertumbuhan ke atas=transenden & Akar>Horizontal = Material).
- Pilar kiri melambangkan demokrasi.
- Pilar tengah melambangkan Negara Hukum, Keadilan dan Ketertiban.
- Pilar kanan melambangkan Hak Asasi Manusia
- Pilar - pilar tersebut menopang pancasila sebagai landasan falsafah negara.
- Warna Biru Tua: Warna dasar yang melambangkan kepercayaan,

Keamanan, Keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri

2.3 Tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta

Tugas

Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan fungsi mengarah kepada wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Kemenkumham.

Fungsi

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum
- c. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan Pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

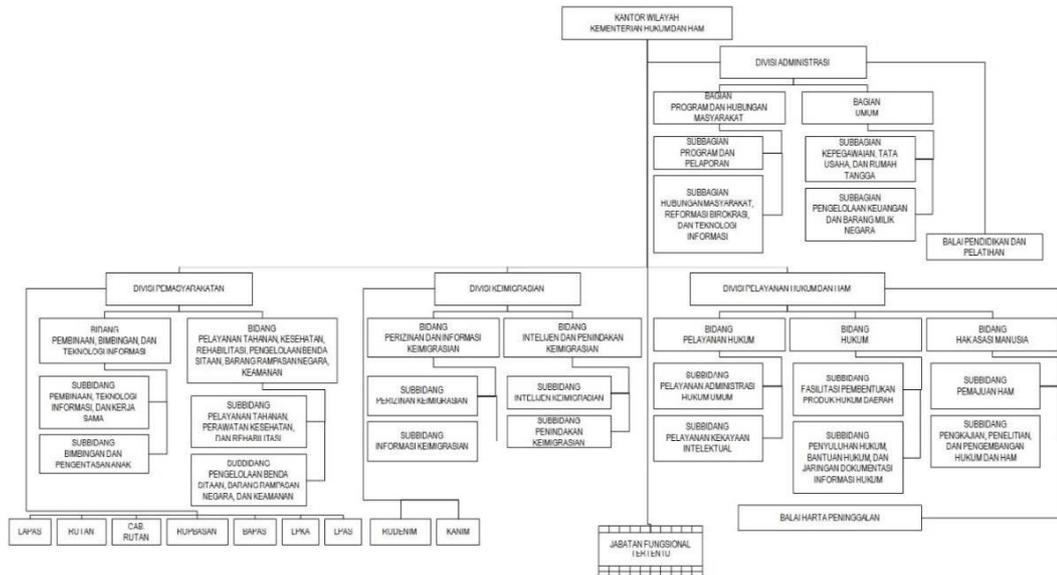
23 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Gambar 2.1 Struktur Kanwil Kemenkumham DKI.Jakarta

Sumber: <https://jakarta.kemenkumham.go.id>

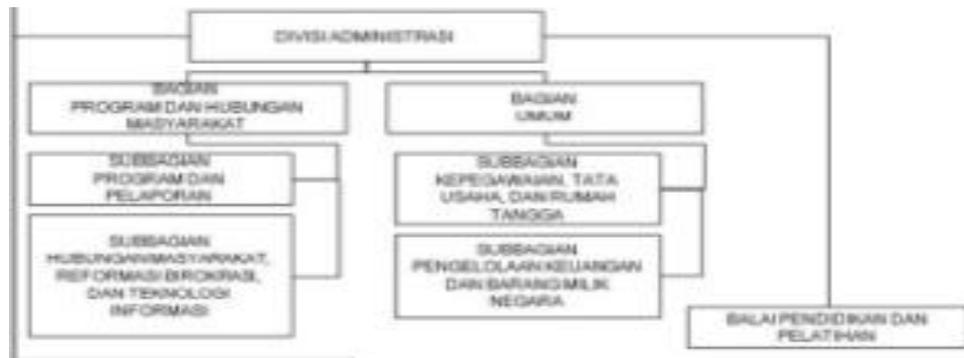
LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



24 Ruang Lingkup Divisi Hubungan Masyarakat

Gambar 2.2



Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Pelaporan

2. subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

2.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Humas, RB & TI adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dalam memantau pelaksanaan kegiatan, mengelola arus informasi internal maupun eksternal, hubungan antara lembaga, dan pelayanan peganduan.
2. Humas, RB & TI dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.